

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sistem perekonomian Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ideologi ekonomi Indonesia bertujuan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia yang mengacu kepada nilai dan tradisi yang berkembang di Indonesia serta berasal dari ruh Pancasila sebagai nilai dasar strategis yang mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Mubyarto dalam artikelnya “Filsafat Ekonomi Pancasila” menegaskan ekonomi Pancasila adalah ekonomi pasar yang mengacu kepada Pancasila. Dalam bekerja, sistem ini harus berdasarkan data riil ekonomi Indonesia dan bersifat moralistic, sosio-nasionalistik dan sosio-demokratik. Dalam pandangan lainnya, Dawan Rahardjo (2004) menggambarkan sistem ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem ekonomi yang disusun berdasarkan UUD 1945 dimana di dalamnya terkandung Pancasila khususnya pasal 33 yang secara implementasinya diperankan oleh koperasi. Koperasi adalah soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian integral tata perekonomian nasional, koperasi berperan dalam menumbuhkembangkan potensi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Berdasarkan definisi koperasi tersebut maka dapat dijelaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang berfungsi untuk mewadahi orang-orang yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama serta dijalankan atas kepentingan bersama khususnya anggota dan umumnya masyarakat serta bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Oleh sebab itu, diharapkan koperasi mampu mencapai tujuannya sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab III pasal 3 yang menyatakan bahwa:

“Koperasi bertujuan memajukan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Berdasarkan tujuan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa tujuan badan usaha koperasi adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan anggota akan terwujud dengan adanya pemenuhan kebutuhan sesuai yang diharapkan oleh anggota sebagai pemilik dan juga sebagai pelanggan dilihat dari partisipasi, transaksi dan juga Sisa hasil usaha (SHU). Untuk mewujudkan hal tersebut maka koperasi menjalankan beberapa unit usaha sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan anggota. Unit usaha yang dijalankan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan koperasi baik dari sisi permodalan maupun dari sisi manajemen, sehingga pada akhirnya koperasi akan semakin kuat dan dapat memberikan pelayanan yang optimal.

Primer Koperasi Karyawan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten disingkat PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 628 KM 14, Kelurahan Cimincrang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat merupakan koperasi yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1982, sempat mengalami dua kali pergantian akta di tahun 1991 dan pada akhirnya disahkan pada tanggal 21 Mei 1999 dengan Nomor Badan Hukum 29/PAD/KDK-10.21IV/1999 dengan jumlah Anggota koperasi pada saat ini sebanyak 489 orang yang terdiri dari Karyawan Perum Perhutani, Pengurus sebanyak 5 orang, Pengawas sebanyak 4 orang dan Karyawan koperasi sebanyak 5 orang. Unit usaha yang dijalankan oleh PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten yaitu Unit penyediaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek “Air Perhutani”, Pengelolaan Wana Wisata, Unit Pengadaan Barang dibidang Industri dan Bahan Kimia, Unit Pertokoan, Sewa Gedung, Unit Usaha Simpan Pinjam, dan sebagai pemilik PT. Anugerah Rimba Selaras (ARS) sebagai unit usaha sub kontraktor yang melaksanakan pekerjaan borongan sesuai dengan permintaan konsumen.

Pengelolaan koperasi sejatinya harus berlandaskan pada prinsip dan nilai-nilai koperasi sehingga tercipta tata kelola koperasi yang baik (*Good Cooperative Governance*) agar tidak terjadi suatu kepailitan. Menurut Prijambon (2012), *Good Cooperative Governance*, merupakan langkah redesain organisasi, menuju organisasi yang sehat, transparan, akuntabel, mandiri, responsible dan wajar dengan tetap mengacu pada nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Kualitas tata kelola

perusahaan merupakan kondisi yang diperlukan untuk menjamin dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan (Fathi,2017).

Berdasarkan definisi tersebut maka *Good Cooperative Governance* atau disingkat dengan GCG merupakan struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organisasi perusahaan koperasi sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan anggota organisasi koperasi berlandaskan pada peraturan yang berlaku serta sebagai upaya Koperasi untuk mencapai tujuannya yaitu memaksimalkan kesejahteraan anggota. Agar dapat menunjang tujuannya menurut Komite Nasional *Kebijakan Governance* (KNKG), ada lima prinsip *Good Corporate Governance* yang perlu diterapkan oleh PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten, prinsip-prinsip tersebut yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan kewajaran.

Pertama transparansi yaitu adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai koperasi. Kedua akuntabilitas yaitu adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi koperasi sehingga pengelolaan koperasi terlaksana secara efektif. Ketiga responsibilitas yaitu respon koperasi terhadap anggota dan kesesuaian di dalam pengelolaan koperasi terhadap peraturan yang berlaku. Keempat kemandirian yaitu keadaan dimana koperasi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di koperasi. Kelima kewajaran

yaitu adanya keadilan, kesetaraan dan perlakuan wajar dalam memenuhi hak-hak Pengurus, Pengawas dan Anggota koperasi berdasarkan peraturan yang berlaku.

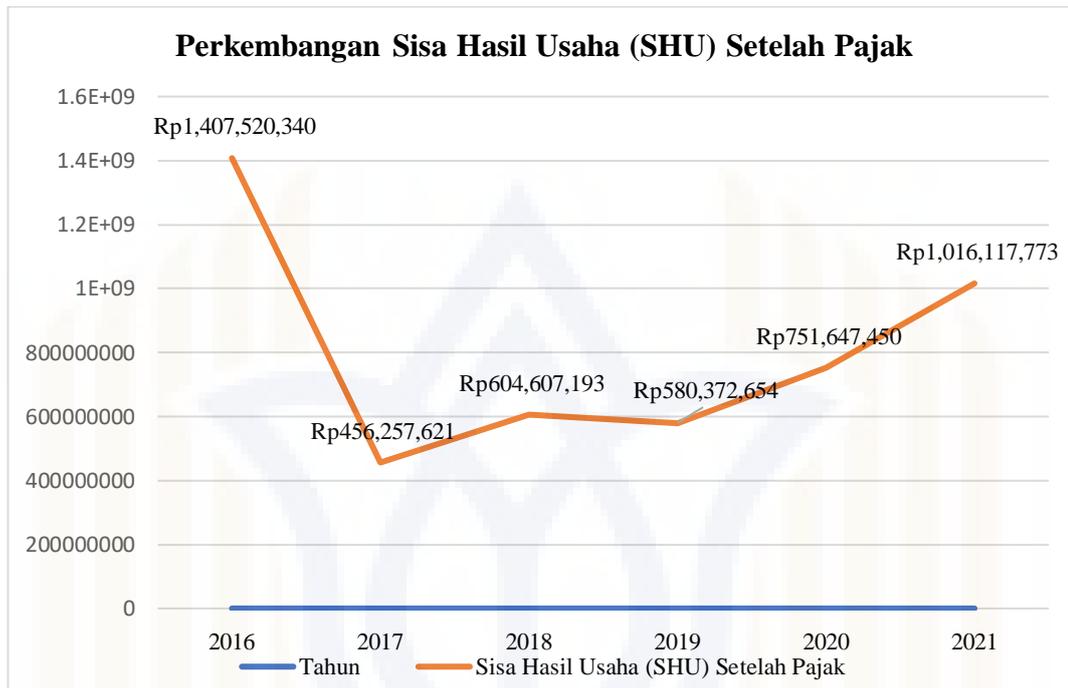
Berdasarkan prinsip pertama pada *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten telah mengupayakan adanya keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan penyampaian informasi kepada para pemangku kepentingan, namun dihadapkan pada suatu kendala dimana PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten belum memiliki *website* sehingga tidak semua informasi dapat tersampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan yang menyebabkan proses keterbukaan koperasi belum optimal. Pada prinsip kedua yaitu akuntabilitas, PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten telah melakukan pertanggung jawabannya terhadap anggota melalui RAT namun dikarenakan anggota koperasi yang tersebar menyebabkan koperasi kesulitan dalam melakukan pengendalian internal seperti menampung aspirasi-aspirasi dari anggota koperasi. Pada prinsip ketiga yaitu responsibilitas, PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten telah memberikan respon yang baik terhadap anggota namun belum optimal. Pada prinsip keempat yaitu kemandirian, PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten mampu menjalankan semua unit kegiatan usahanya namun ada beberapa unit usaha yang masih berkaitan dengan Perum Perhutani. Dan pada prinsip yang kelima yaitu kewajaran, PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten memiliki kesulitan dalam pemenuhan hak dan kewajiban terhadap seluruh anggota koperasi karena anggota koperasi yang tersebar luas sesuai dengan KPH-KPH Perhutani.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan prinsip *Good Corporate Governance* yang diterapkan pada PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten adalah dari sisi non-keuangan, namun kondisi tersebut dipastikan akan ada keterkaitannya dengan kinerja keuangan karena prinsip-prinsip dasar dari *GCG* pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Fahmi dalam buku analisis kinerja keuangan (2017, 2) menyebutkan bahwa:

“Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”.

Gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan laporan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Analisis rasio adalah teknik analisis laporan keuangan yang dapat menggambarkan suatu hubungan atau perimbang antara pos atau kelompok pos yang lain, baik yang tercantum dalam neraca ataupun dalam laba rugi. dalam menilai laporan keuangan koperasi, hal pertama yang dilakukan sebelum menganalisis rasio adalah melihat besarnya perkembangan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh koperasi dalam beberapa periode tertentu.

Berikut disajikan data perkembangan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten Tahun 2016-2021.



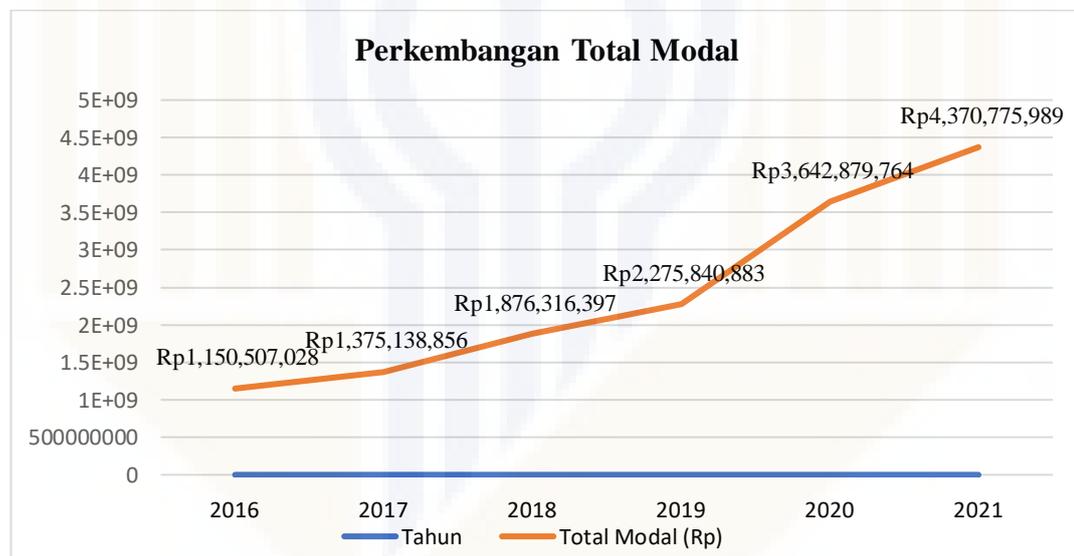
Gambar 1. 1 Perkembangan Sisa Hasil Usaha (SHU) PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit II Jabar dan Banten Tahun 2016-2021

Sumber : Laporan RAT PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten Tahun 2016-2021

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa Perkembangan Sisa Hasil Usaha (SHU) PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten menunjukkan adanya fluktuasi dengan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 Sisa Hasil Usaha (SHU) PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten adalah sebesar Rp 1,407,520,340, mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 67.58% menjadi Rp 456,257,621, pada tahun 2018 Sisa Hasil Usaha (SHU) PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten mengalami kenaikan kembali sebesar 32.51% menjadi Rp 604,607,193, namun terjadi penurunan kembali pada tahun 2019 sebesar 4.01% menjadi Rp 580,372,654, pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali sebesar 29.51% menjadi sebesar Rp 751,647,450, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan

sebesar 35.11% sehingga Sisa Hasil Usaha (SHU) PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten menjadi sebesar Rp 1,016,117,773. Selain melihat Sisa Hasil Usaha (SHU), kinerja keuangan juga melihat jumlah modal dan jumlah aktiva untuk melihat seberapa besar modal dan kekayaan yang dimiliki oleh koperasi.

Berikut merupakan data Perkembangan Total Modal PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten Tahun 2016-2021.



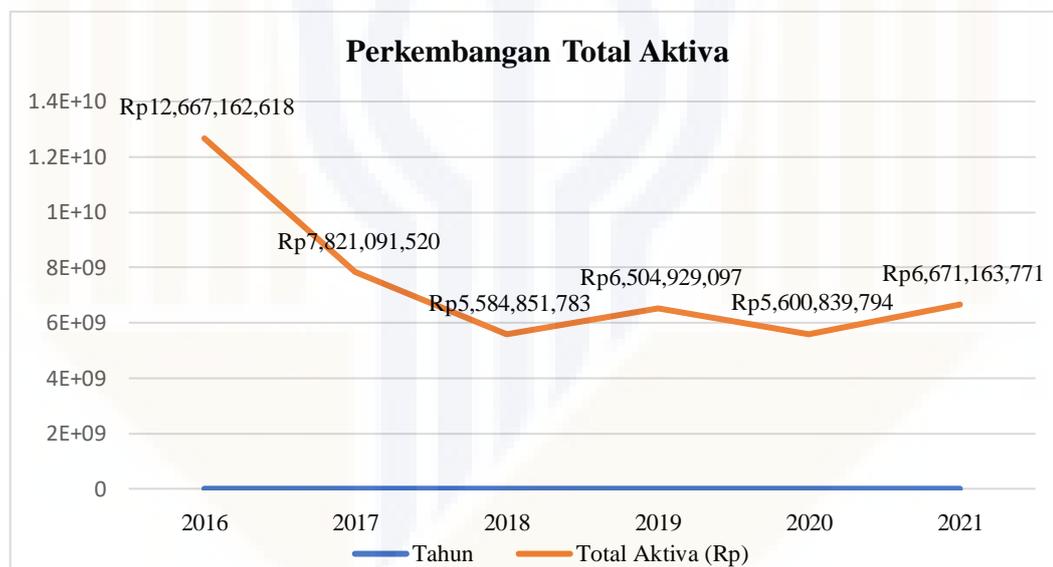
Gambar 1. 2 Perkembangan Total Modal PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten Tahun 2016-2021

Sumber : Laporan RAT PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten Tahun 2016-2021

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa total modal PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 total modal PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten adalah sebesar Rp 1,150,507,028, pada tahun 2017 meningkat sebesar 19.52% menjadi Rp 1,375,138,856, pada tahun 2018 meningkat sebesar

36.45% menjadi Rp 1,876,316,397, pada tahun 2019 meningkat sebesar 21.29% menjadi Rp 2,275,840,883, pada tahun 2020 total modal meningkat sebesar 60.07% menjadi Rp 3,642,879,764, dan pada tahun 2021 total modal PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten meningkat sebesar 19.98% menjadi Rp6,671,163,771.

Berikut merupakan data Perkembangan Total Aktiva PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten Tahun 2016-2021



Gambar 1. 3 Perkembangan Total Aktiva PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten Tahun 2016-2021

Sumber : Laporan RAT PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten Tahun 2016-2021

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten memiliki total aktiva sebesar Rp 12,667,162,618, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 7,821,091,520 (penurunan sebesar 38.28%), pada tahun 2018 total aktiva mengalami penurunan kembali menjadi sebesar Rp 5,584,821,783

(penurunan sebesar 28.59%), namun pada tahun 2019 total aktiva mengalami peningkatan menjadi Rp 6,504,929,097 (meningkat sebesar 16.47%), pada tahun 2020 total aktiva mengalami penurunan kembali sebesar 13,90% menjadi Rp 5,600,839,794, dan pada tahun 2021 total aktiva PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten mengalami kenaikan sebesar 19.11% menjadi Rp 6,671,163,771.

Berikut merupakan Perbandingan Persentase Perkembangan Total Modal, Total Aktiva, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten Tahun 2016-2021

Tabel 1. 1 Perbandingan Persentase Perkembangan Total Modal, Total Aktiva, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten Tahun 2016-2021

Tahun	Total Modal (%)	Total Aktiva (%)	Sisa Hasil Usaha (SHU) Setelah Pajak (%)
2016	-	-	-
2017	19.52	(38.26)	(67.58)
2018	36.45	(28.59)	32.51
2019	21.29	16.47	(4.01)
2020	60.07	(13.90)	29.51
2021	19.98	19.11	35.19
Keterangan	Meningkat	Menurun	Fluktuasi (Kecenderungan Menurun)

Sumber : Laporan RAT PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten Tahun 2016-2020

Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai Perbandingan Persentase Perkembangan Total Modal, Total Aktiva, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten Tahun 2016-2021 dapat dilihat bahwa Total Modal mengalami peningkatan, Total Aktiva mengalami penurunan dan Sisa Hasil

Usaha (SHU) mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Peningkatan Total Modal tidak dibarengi dengan peningkatan Total Aktiva dan Sisa Hasil Usaha (SHU), jika hal tersebut dibiarkan maka akan berdampak terhadap kinerja dalam hal ini kinerja keuangan. Salah satu faktor penyebab hal tersebut diduga adalah penerapan *Good Cooperative Governance* (GCG) pada PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten yang belum maksimal. Maka dari itu diharapkan ketika PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten memperbaiki penerapan prinsip-prinsip *Good Cooperative Governance* (GCG), laporan keuangan koperasi menjadi lebih transparan dan akurat serta hasil analisis kinerja keuangan menunjukkan gambaran yang lebih baik.

Hasil penelitian terdahulu Luh Gede Diah Ary Pradnyaswari dan I Gusti Ayu made Asri Dwija Putri (2016) menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran berpengaruh positif pada kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Klungkung. CV Situmorang, A Simanjuntak (2019) menunjukkan bahwa secara parsial menunjukkan bahwa persentase kepemilikan institusional, komposisi dewan direksi, dan komposisi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan dengan arah koefisien negatif terhadap ROE. sedangkan secara simultan persentase kepemilikan institusional, komposisi dewan direksi dan komposisi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap ROE dengan arah koefisien positif. Ristifany (2009) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hubungan implementasi prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja perusahaan memiliki hubungan searah yang sangat kuat. Dan Ridwan Frediawan (2008) menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good*

Corporate Governance sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan serta didukung oleh beberapa teori dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti membuat kalimat pernyataan penelitian “**Analisis Penerapan *Good Cooperative Governance* dalam Mengukur Tingkat Kinerja Keuangan**”. Maka dari itu peneliti akan mengkaji lebih mendalam dengan melakukan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan studi kasus pada PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dalam uraian latar belakang penelitian dan untuk memberikan batasan pada permasalahan yang diambil, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan *Good Cooperative Governance* pada PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten.
2. Bagaimana Kinerja Keuangan pada PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten.
3. Bagaimana hubungan antara *Good Cooperative Governance* dengan Kinerja Keuangan pada PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten.
4. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten dalam meningkatkan Kinerja Keuangan melalui Penerapan *Good Cooperative Governance*.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka maksud dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendeskripsikan mengenai penerapan *Good Cooperative Governance* (GCG) dalam mengukur tingkat kinerja keuangan pada PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten sehingga dapat mengumpulkan data dan informasi yang bermanfaat dalam mendukung pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh koperasi sesuai dengan topik yang diteliti dalam penelitian ini.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dari:

1. Penerapan *Good Cooperative Governance* pada PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten.
2. Kinerja Keuangan pada PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten.
3. Hubungan antara *Good Cooperative Governance* dengan Kinerja Keuangan pada PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten.
4. Upaya yang harus dilakukan oleh PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten dalam meningkatkan Kinerja Keuangan melalui Penerapan *Good Cooperative Governance*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengembangan keilmuan di bidang ilmu manajemen khususnya manajemen keuangan terkait *good cooperative governance* dan kinerja keuangan yang berwawasan koperasi serta hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan atau bahan kajian literatur dalam penelitian berikutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Pengurus, Pengawas, Anggota, dan Karyawan PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten dalam rangka membuat keputusan pengembangan usaha koperasi saat ini maupun dimasa yang akan datang dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta masukan dalam pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh koperasi. Sedangkan bagi koperasi secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan perkoperasian di Indonesia